

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA
TNI OLEH PENGADILAN MILITER**

SKRIPSI

Oleh

Aviara Jeka Ashivatuszahra

NIM. 05010322006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aviara Jeka Ashivatuszahra
NIM : 05010322006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI oleh Pengadilan Militer

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Februari 2026
Yang menyatakan,



Aviara Jeka Ashivatuszahra
NIM. 05010322006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Aviara Jeka Ashivatuszahra

NIM : 05010322006

Judul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI Oleh
Pengadilan Militer

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diunqasahkan.

Surabaya, 5 Februari 2026
Pembimbing,


Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aviara Jeka Ashivatuszahra


NIM : 05010322006

Judul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI oleh Pengadilan Militer

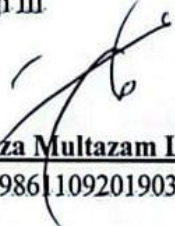
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Marli Candra, LLb (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji III


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II


Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 27 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hj. Sa'adah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aviara Jeka Ashivatuszahra
NIM : 05010322006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : aviarajeka57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI oleh Pengadilan Militer

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Aviara Jeka Ashivatuszahra)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya memerlukan mekanisme peradilan khusus, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktik, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif masih menghadapi persoalan kewenangan absolut antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peradilan Militer. Dualisme pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status pelaku. Permasalahan penelitian ini dirumuskan pada dua hal, yaitu bagaimana implementasi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi oleh anggota TNI aktif pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta bagaimana upaya harmonisasi regulasi kewenangan absolut peradilan ditinjau dari prinsip persamaan di hadapan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) secara implementasi pertentangan normatif antara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif masih dialihkan ke peradilan militer dengan alasan status subjek hukum, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan kaidah *takhsis al-'ām* seluruh perkara korupsi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2) Upaya harmonisasi dalam perspektif prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*) dan *Al-Musāwāh* berupa penegasan pembatasan yurisdiksi dan penyelarasan antar Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pembentuk Undang-Undang melakukan harmonisasi dan penataan ulang regulasi kewenangan peradilan dengan menegaskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang berwenang mengadili seluruh tindak pidana korupsi tanpa pengecualian berdasarkan status pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum perlu membangun keseragaman penafsiran dan penerapan hukum agar penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Landasan Teori	18
H. Definisi Operasional	25
I. Metode Penelitian	28
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PANDANGAN ASAS <i>LEX</i> <i>SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI</i> DAN PRINSIP PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM (<i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>)	35
A. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	35
B. Prinsip Persamaan dihadapan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>).....	48
BAB III IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA TNI OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	55

A. Implementasi Penyelesaian Perkara Korupsi oleh Anggota TNI dalam Praktik Hukum Positif Indonesia.....	55
B. Implementasi Penyelesaian Perkara Korupsi Anggota TNI oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> dan <i>Takhsis Al-‘ām</i>	64
1. Implementasi Penyelesaian Perkara Korupsi Anggota TNI oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	64
2. Implementasi Penyelesaian Perkara Korupsi Anggota TNI oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari <i>Takhsis Al-‘ām</i>	80
BAB IV UPAYA HARMONISASI REGULASI KEWENANGAN ABSOLUT BERDASARKAN PRINSIP PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM (<i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>)	86
A. Upaya Harmonisasi Regulasi Kewenangan Absolut Berdasarkan Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>).....	86
B. Upaya Harmonisasi Regulasi Kewenangan Absolut Berdasarkan Konsep <i>Al-Musāwāh</i>	101
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
BIODATA PENULIS.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	4
Tabel 4.1 Perbandingan Implementasi Penyelesaian Perkara Korupsi yang Melibatkan Unsur Militer.....	95



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1990.
- Asshiddiqie, Jimly, *Reformasi Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Dan Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2020.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Harjono. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu-Isu Aktual*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2020.
- Kadarudin. *Penegakan Hukum Pidana Oleh Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Negara Hukum Dan Penerapannya Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Dan Kompetensi Peradilan*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- . *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung: PT Alumni, 2016.
- . *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Sadiawati, Diana. *Strategis Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Tertib*. Kementrian PPN/Bappenas, 2015.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni, 2002.

Soepomo, R. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2020.

Suarni, Herli Antoni, Nur Asmarani, Sri Wahyuni, and Mia Amali. *Buku Referensi Hukum Pidana (Teori Komperhesif)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Jurnal Ilmiah

Ahmad, Syaiful. "Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Prajurit." *Jurna Yudisial* 11, no. 1 (2020).

Alfajri, S. M. "Kewenangan Oditur Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan TNI." *Res Justisia* 4, no. 2 (2020).

Amin Sahib, Muhammad. "Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya ('âm - Khâs - Muthlaq - Muqayyad)." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2020).

Amu, Robi. "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Disersi." *Neliti*, 2023.

Arifin Mochtar, Zainal. "Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).

Aryadi Wicaksana, Yonathan. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali." *Wicaksana: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2021).

Asri Puanandini, Dewi, Danu Supriatna, and Fahmi Idris. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintah Dan Hukum* 2, no. 3 (2023).

- Asrul, and R. Pamungkas. “Koordinasi KPK Dan Penyidik Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Prajurit TNI.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022).
- Asshiddiqie, Jimly. “Ciri Dan Asas Negara Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2020).
- Azzahra, Syifa, Irsyad Aleksa Zulkarnain, and Nazwan Aulia. “Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (May 2025): 835–41. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1150>.
- Banaszewska, Dorota Marianna. “Lex Specialis.” *Oxford Public International Law*, 2025.
- Binus, University. “Memahami 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior.” *Binus University School of Accounting*, n.d. Accessed December 19, 2025. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/>.
- BJ, Jusmiwanti, Marlina T, Mursal, and Abdul Halim Hanafi. “Konsep ‘Am Dan Khash Dalam Ushul Fiqh Serta Implikasinya.” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025): 1083–84.
- Budi Utami, Niken Subekti, and Supriyadi. “Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Yustisia* 2, no. 2 (2024).
- Cerdas, Felani Ahmad, Ali Abdurahman, and Indra Perwira. “Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia.” *JIHK* 4, no. 1 (July 2022): 40–53. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.149>.

- Fadli, Ahmad. "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota TNI." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 3 (2020).
- Fajar Ryansyah, M. Risky, A Zarkasih, and Iswandi. "Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundangan-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.42974>.
- Ichwan Kurniawan, Moch. "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021).
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al' Adl* 9, no. 3 (2020).
- Khoiruddin, Aldi Rizki, and Muhammad Rustamaji. "Mengadili Perakara Ne Bis In Idem Kajian Putusan Nomor 957/ K/PID.SUS?/2018." *Jurna Yudisial* 16, no. 1 (2023).
- Joko Sutrisno, Akhmad Fijiansyah. "Konsepsi Ajaran Logische Speciliteit Dan Systematische Specialiteit." *Pengadilan Negeri Pontiakank*, 2.
- K Fitriana, Mia. "Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil." *Arena Hukum* 7, no. 2 (2021).
- Lailatul Munawaroh, Muhammad Irsad, and Eka Prasetiawati. "Konsep Al-Musāwāh dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (August 2025): 241–55. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.363>.
- Masruroh, Lailatul, and Abdullah fikri. "Tinjauan Yuridis Terhadap TNI Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan

Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Militer.” *Jurnal Darma Agung* 32 (2024).

Melissa Walukow, Julita. “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2023).

Memi, Cut. “Penyelesai Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2020): 115. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.142>.

Mulyadi, Lilik. “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2021).

Parluhutan Sagala, Mayor Chk, and Mayor Chk Fredy Ferdian. “Yurisdiksi Peradilan Militerdalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Dilmil Jakarta*, n.d.

Prasetyo, E. “Sistem Upaya Hukum Dalam Peradilan Militer.” *Jurnal Yustisia* 22, no. 1 (2021).

Rasyidi, Mudemar A. *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama*. n.d.

Ridlo, Ali, and Siswantari Pratiwi. *Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer*. 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5701>.

Rumbay, Maxentius. “Kedudukan Ankuam Dalam Sistem Hukum Militer Indonesia.” *Scentia: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2020).

Ryansyah, M. Rizky Fajar, and A. Zarkasih. “Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.42974>.

- Sagala, Letkol Chk Parluhutan. "Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas." *e-Journal Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*.
- Selamat Nazar, Abdul. "Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)." *Media Neliti*, n.d.
- Subekti Budi Utama, Niken, and Supriyadi. "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Yustisia* 3, no. 2 (2024).
- Tresna Rahayu, Cantika, and Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: Problematika Dan Urgensi Reformasi." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 2 (2025).
- V.O Rumate, Priska, Daniel F. Aling, and Daniel Maramis. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer*. n.d.
- Wati, Rani Yohana, and Riki Zulfiko. *Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI : Studi Kasus Basarnas RI*. 2, no. 2 (2024).
- Widyantari, Padma, and Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (February 2020): 117. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.
- Wira Pratama, M. Ilham. "Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian Pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 1 (2023).

Yohana Wati, Rani, and Riki Zulfiko. "Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI: Studi Kasus Basarnas RI." *Sumbang 12 Journal 2*, no. 2 (2024).

Yustisia. "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara." *Yustisia 3*, no. 2 (2021).

Zainatul Nadra, Nur, and Latifah. "Analisis Konsep 'Adalah Dan Musawah Menurut Al-Qur'an Dan Al-Sunnah.'" *Universiti Tun Hussein Onn Malaysia*, n.d.

Zuliah, Azmiati. "Penerapan Adigium Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal 5*, no. 2 (2025).

Zuliah, Azmiati, and Fitri Amalia. "Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Law Jurnal 5*, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6079>.

———. "Penerapan Adigium Lex Spesialis Derogat Legi Generali Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal 5*, no. 2 (2025): 125.

Zunaidi, Moh Halimi. "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama." *L-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024).

Media Elektronik

Abdul Azhim, Syaikh. "Hadd Sariqoh (Mencuri)." *Almanhaj*, n.d. Accessed November 12, 2025. <https://almanhaj.or.id/1436-hadd-sariqah-mencuri.html>.

- Aidi, Faizin. "Wacana Revisi UU Peradilan Militer, Begini Pendapat Muhadjir Effendy." *Jatim.Net*, 2025. <https://jatimnet.com/wacana-revisi-uu-peradilan-militer-begini-pendapat-muhadjir-effendy>.
- Al, Araf. "Kasus Basarnas Dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer." *Kompas.Id*, 2023. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-basarnas-dan-urgensi-reformasi-peradilan-militer>.
- DetikNews, Team. "KPK Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka Kasus Suap!" *Detik Jogja*, July 26, 2023. https://www.detik.com/jogja/berita/d-6843551/kpk-tetapkan-kepala-basarnas-tersangka-kasus-suap#google_vignette.
- Dwi Harjanti, Sulis. "Permasalahan Dasar Reformasi Regulasi." *Sekolah Tinggi Indonesia Jentera*, n.d. <https://www.youtube.com/live/l09Xcr2MTUM?si=VQCyxc30r-O1aAUV>.
- Ferdiansyah, Hengki. "Ini Nasihat Rasulullah Kepada Penegak Hukum." *NU Online*, 2019. <https://nu.or.id/syariah/ini-nasihat-rasulullah-kepada-penegak-hukum-tzn8X>.
- "Harmonisasi." *KBBI Web*, n.d. <https://kbbi.web.id/harmonisasi>.
- Januar Rizki, Muhammad. "Mengurai Problematika Penataan Regulasi Di Indonesia." *Hukum Online*, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-problematika-penataan-regulasi-di-indonesia-lt62b2f42a08f3a/>.
- Kompas. "Soal Kepala Basarnas Korupsi, TNI Tegaskan Tak Ada Prajurit Kebal Hukum: Semua Tunduk Kepada Aturan." *Kompas TV*, July 29, 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/429922/soal-kepala-basarnas-korupsi-tni-tegaskan-tak-ada-prajurit-kebal-hukum-semua-tunduk-kepada-aturan?page=all>.

Kontras. “Siaran Pers Tim Advokasi Untuk Reformasi Sektor Keamanan Mahkamah Konstitusi: Batalkan Pasal-Pasal Bermasalah, Selamatkan Demokrasi Dan Negara Hukum.” *Siaran Pers Kontras*, 2025. <https://kontras.org/artikel/siaran-pers-tim-advokasi-untuk-reformasi-sektor-keamanan-mahkamah-konstitusi-batalkan-pasal-pasal-bermasalah-selamatkan-demokrasi-dan-negara-hukum>.

“Korupsi.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d. <https://kbbi.web.id/korupsi>.

Medi Christian Nababan, Willy. “Revisi UU Peradilan Militer Dipastikan Akan Menghadapi Tantangan.” *Kompas.Id*, 2023. <https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-peradilan-militer-dipastikan-akan-menghadapi-tantangan>.

Primayoga, Egi, and Wana Alamsyah. “Militer Dan Korupsi: Impunitas, Tebang Pilih, Dan Ancaman Revisi UU TNI.” *Indonesian Corruption Watch*, March 18, 2025. <https://antikorupsi.org/id/militer-dan-korupsi-impunitas-tebang-pilih-dan-ancaman-revisi-uu-tni>.

Makalah, Skripsi, dan Tesis

Purwanti, Eva. “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Militer Yang Tidak Mentaati Perintah Dinas.” *Skripsi UII Yogyakarta*, 2020.

Roqib, M. “Harmonisasi Peraturan.” *Perpustakaan Universitas Airlangga*, no. Tesis (2020).

Suhartono. “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien Dan Akuntabel).” Universitas Indonesia, 2021. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old20/135842-T%2027992-Harmonisasi%20peraturan-HA.pdf>.

Wahyuni, Willa. “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.” *Hukum Online*, 22 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>.

Wildan Abdillah, Adi. "Kaidah 'Am Dan Khaash Beserta Kaidah Takhsish Dan Mukhasish." *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2021.

Al-Qur'an

Qs. Al-Hujurat:13, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>.

Qs. Al-Māidah: 38, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38>.

Qs. Al-Baqarah:246, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/245>.

Qs. Al-Baqarah: 228, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>.

Qs. Al-Hujurat:6, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/6>.

Qs. Ali 'Imran:185, <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/185>.

Qs. An-Nisa':59, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>.

Qs. An-Nisa':92, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/92>.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU -XXI/2023. (2023).

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 40-K/PMT.II/AU/XII/2023, Tanggal 22 Juli 2024.

Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 18-K/PMU/BDG/AU/IX/2024, Tanggal 13 November 2024.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023, Tanggal 13 Juli 2023.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, Tanggal 17 Juli 2023.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, Tanggal 25 Oktober 2023.